

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka diambil kesimpulan bahwa *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara diidentifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1) *Stakeholder* utama (Primer)

Stakeholder primer pada pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara yaitu masyarakat Desa Dieng Kulon dan Pokdarwis Dieng Pandawa. Masyarakat Desa Dieng Kulon merupakan *stakeholder* yang memiliki keterlibatan aktif dalam program pengembangan pariwisata. Keterlibatan tersebut ditunjukkan dengan peran masyarakat dalam membangun fasilitas pariwisata berupa pembangunan *homestay*, warung makan, toko oleh-oleh, dan sebagainya. Namun, kondisi lahan dan pemukiman menyebabkan belum maksimalnya pembangunan fasilitas pariwisata. Masyarakat juga aktif dalam mengelola pariwisata melalui kontribusi ide, tenaga, dan keterampilan seperti sebagai inisiator penyelenggaraan *Dieng Culture Festival*, sebagai pengelola sampah pariwisata, dan memiliki keterampilan dalam membuat produk makanan serta kerajinan khas Dieng. Potensi pariwisata alam maupun

budaya yang dimiliki Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Pariwisata berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, namun memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan karena pembangunan yang terus dilakukan.

2) *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, dan Pemerintah Desa Dieng Kulon. *Stakeholder* tersebut memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dan program, pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan sebagai pemberi bantuan teknis pengembangan pariwisata. Kebijakan atau program yang dibuat mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2030. Program pemberdayaan yang diberikan misalnya pelatihan pemandu wisata, pelatihan *digital marketing*, dan pelatihan pelaku pariwisata lainnya. Di lapangan, UPTD Kawasan Wisata Dieng melakukan interaksi dan koordinasi secara langsung kepada masyarakat dan pelaku pariwisata.

3) *Stakeholder* sekunder

Stakeholder sekunder dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kementerian PUPR, Podarwis Dieng Pandawa, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Bank Indonesia, Bank BTN, PT Geodipa Energi, Perguruan

Tinggi, dan media. *Stakeholder* sekunder tersebut tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan pembangunan namun memiliki kepedulian besar dalam proses pengembangan. *Stakeholder* ini memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengembangan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

1) Kementerian PUPR berperan dalam penyediaan sarana prasarana melalui penataan kawasan wisata, 2) BPCB Jawa Tengah sebagai *stakeholder* yang memelihara, melindungi, dan melestarikan cagar budaya, 3) Perhutani berperan dalam mengelola dan memberikan perizinan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pariwisata, 4) Pokdarwis Dieng Pandawa melakukan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan sapta pesona, 5) Bank memberikan bantuan modal dan anggaran penyediaan sarana prasarana, 6) PT Geodipa Energi melalui program *Corporate Social Responsibility*-nya mendukung optimalisasi lingkungan dengan memberikan pendampingan dan dukungan sarana pengolahan sampah, 7) Akademisi sebagai pihak yang memberikan dorongan pengetahuan, dan 8) Media sebagai *stakeholder* yang menyediakan informasi serta promosi pariwisata.

1.1.2 Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka diambil kesimpulan bahwa peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dianalisis berdasarkan lima peran, yaitu : *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

1) *Policy creator*

Stakeholders yang melaksanakan peran sebagai *policy creator* yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan UPTD Kawasan Wisata Dieng. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara memiliki fungsi yang termuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yang menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan memiliki kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara berperan dalam membuat kebijakan, program dan mengambil keputusan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2030. Program dibuat oleh masing-masing bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yaitu terdiri dari ; 1) Bidang kelembagaan dan SDM pariwisata, 2) Bidang destinasi pariwisata, 3) Bidang pemasaran destinasi pariwisata, 4) Bidang kebudayaan, sedangkan UPTD Kawasan Wisata Dieng berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Koordinator

Peran koordinator dalam pengembangan pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, dan Pokdarwis Dieng Pandawa. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, sedangkan UPTD Kawasan Wisata Dieng melakukan koordinasi dengan para pelaku pariwisata, mengelola dan mengawasi program pengembangan pariwisata secara langsung di lapangan dengan masyarakat, para pelaku pariwisata, swasta, dan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata serta melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pokdarwis Dieng Pandawa melakukan koordinasi dengan masyarakat dan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

3) Fasilitator

Peran fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara memfasilitasi program pengembangan pariwisata di bidang kelembagaan dan SDM pariwisata, penyediaan sarana prasarana dan peningkatan daya tarik wisata, serta pemasaran dan promosi destinasi pariwisata. Kementerian PUPR memfasilitasi anggaran dan sarana prasarana penataan kawasan wisata Dieng. Pokdarwis Dieng Pandawa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Perusahaan seperti Perhutani, Bank, PT Geodipa Energi menyediakan fasilitas sarana prasarana pengolahan sampah, mulai dari lahan hingga mesin yang digunakan. Namun, masih terdapat fasilitas pariwisata yang kurang memadai, yaitu kurangnya lahan parkir, rambu petunjuk jalan yang sudah tidak layak, keberadaan kantong-kantong sampah yang masih minim, dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal.

4) Implementor

Stakeholder sebagai implementor dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara belum melaksanakan perannya dengan maksimal. Hal ini dilihat dari implementasi kebijakan oleh *policy creator* yang belum diterapkan dengan optimal. Peran implementor yang belum maksimal di antaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yang belum mampu memaksimalkan perannya sebagai pembangun sarana prasarana pariwisata, kualitas SDM pariwisata, dan promosi yang dilakukan. Hal ini terbukti dengan masih adanya fasilitas yang kurang memadai seperti lahan parkir, kantong-kantong sampah, dan rambu petunjuk objek wisata. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan SDM pariwisata juga masih minim diselenggarakan. Dampak pariwisata terhadap lingkungan juga belum mampu diatasi dengan baik, salah satunya terkait kebersihan, kelestarian hutan, air, dan pertanian.

5) Akselerator

Akselerator meliputi peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, yaitu melakukan pemasaran pariwisata melalui *online* maupun *offline* misalnya dengan pembuatan *website*, sosial media, pameran pariwisata, kegiatan famtrip, dan sebagainya. Namun, promosi melalui *online* belum maksimal karena web yang sering *down* dan kurangnya SDM

pengelola media sosial.

1.2 Saran

4.2.1 Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat peneliti berikan guna memberikan masukan dalam identifikasi *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1. Perlunya menjalin kerjasama dengan *stakeholder* lain dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan karena melihat dampak pariwisata terhadap lingkungan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang semakin parah.
2. Perlunya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pemasaran usaha pariwisata mereka misalnya promosi produk, jasa, akomodasi, dan sebagainya karena pemasaran sejauh ini hanya berfokus pada promosi objek wisata saja.

1.2.2 Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat peneliti berikan guna memberikan masukan dalam peran *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan sebagai *policy creator* yang berwenang dalam membuat perencanaan kebijakan

dan pengambil keputusan perlu melakukan penataan kawasan pemukiman masyarakat, tidak hanya di objek wisata saja karena berkembangnya pembangunan fasilitas dan berbagai usaha masyarakat lainnya yang tidak disertai dengan kantong-kantong parkir yang memadai menyebabkan muncul permasalahan kemacetan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

2. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan himbauan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan monitoring pengelolaan sampah di TPST karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung, jumlah sampah juga semakin meningkat. Pengelolaan sampah di TPST juga perlu diakomodasi kebutuhannya karena kurangnya tenaga kerja yang kompeten menyebabkan pengelolaan sampah tidak maksimal.
3. Perlu adanya program pembangunan Sumber Daya Manusia pariwisata untuk meningkatkan kompetensi baik masyarakat, pelaku usaha pariwisata, maupun tenaga kerja di bidang terkait.